



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

**Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar Triwulan I**

2025



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut



**Salam
PRIMA**

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.4 Organisasi	5
1.5 Kepegawaian.....	7
1.6 Potensi	9
1.7 Permasalahan	14
1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	27
IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	28
IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	30
IK 4. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	31
IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	34
IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	35
IK 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) ..	39
IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	41

IK 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	46
IK 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	47
IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	49
IK 12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)	51
IK 13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	52
IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	54
IK 15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%).....	56
IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai).....	58
3.3 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Rekomendasi.....	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja.....	6
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	11
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	11
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024	21
Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025.....	24
Tabel 8. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar	27
Tabel 9. <i>Capaian IK 2 BPSPL Denpasar</i>	29
Tabel 10. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar	30
Tabel 11. Dokumentasi IK 3.....	31
Tabel 12. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar	32
Tabel 13. Dokumentasi IK 4.....	33
Tabel 14. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar	34
Tabel 15. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar	37
Tabel 16. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar	40
Tabel 17. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar	44
Tabel 18. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar	46
Tabel 19. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar	48
Tabel 20. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar	50
Tabel 21. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar	51
Tabel 22. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar	53
Tabel 23. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar	55
Tabel 24. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar	57
Tabel 25. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar	60
Tabel 26. <i>Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025</i>	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar.....	6
Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar	24

@bpsp idenpasar

BerAKHLAK

berakhlak mulia dalam berinteraksi dengan orang lain
di rumah, di sekolah, dan di masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN



Laporan
Kinerja
BPSPL
Denpasar
Triwulan I
Tahun
2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Triwulan I Tahun 2025.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tanggal 6 September 2021. Secara khusus UPT mengawal UU No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan beserta turunannya dan UU No. 27 tahun 2007 Jo UU No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil beserta turunannya. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;

- 5) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Denpasar secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- 3) Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
- 4) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), Ramsar *Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi DJPKRL di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF);

- 5) Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- 6) Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7) Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.4 Organisasi

Struktur Organisasi BPSPL Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN/KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN/KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPSPL Denpasar dibantu 3 Satuan Kerja (Satker) yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Satker Surabaya, Satker Mataram dan Satker Kupang.

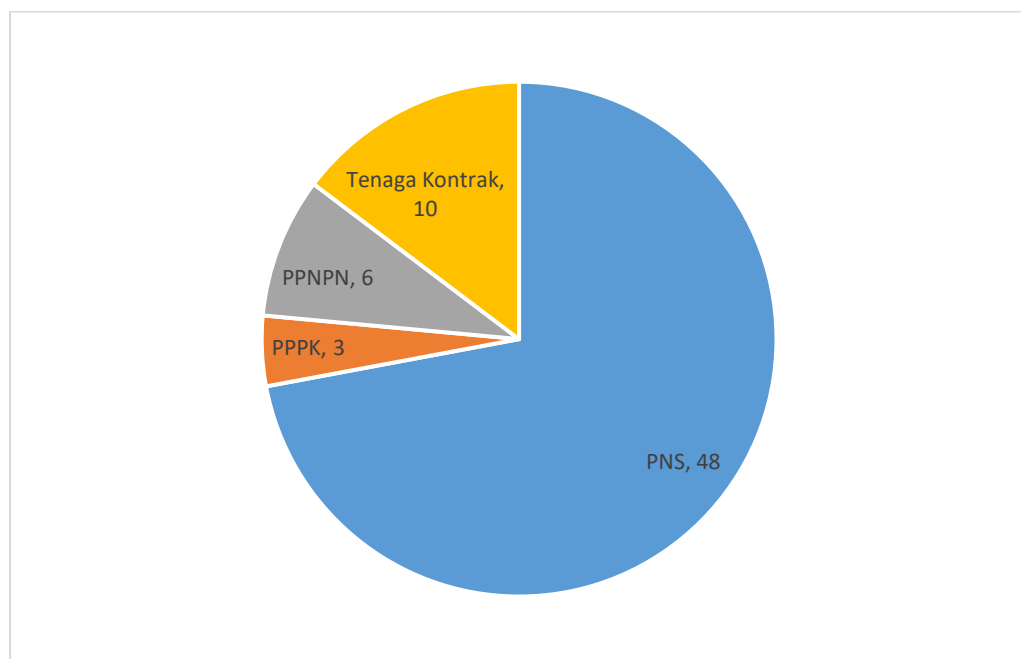
Tabel 1. Nama Satker dan Wilayah Kerja

No	Nama Satker	Koordinator	Wilayah Kerja
1.	Satker Surabaya	Suwardi, S.T., M.Si	Provinsi Jatim
2.	Satker Mataram	Muhammad Barmawi, M.Sc	Provinsi NTB
3.	Satker Kupang	Muhammad Dikyah Fadillah, S.Pi.	Provinsi NTT
4.	Pos Pelayanan Banyuwangi	Dewi Retnoningrum, S.Pi	Provinsi Jatim

1.5 Kepegawaian

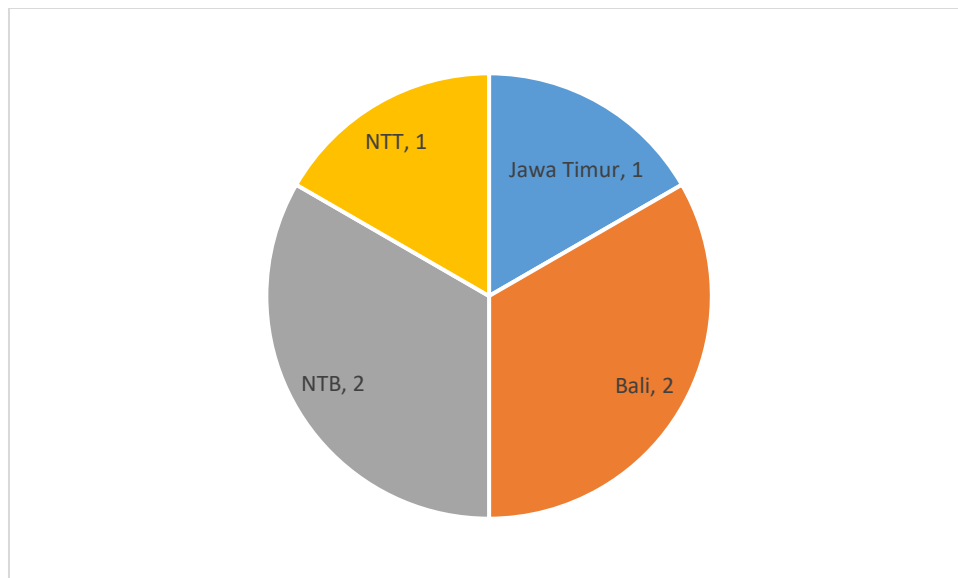
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak pada tahun 2025 sebanyak 67 orang terdiri dari 48 PNS, 3 PPPK, 6 PPNPN, dan 10 tenaga kontrak. Komposisi pegawai berdasarkan status pegawai ditampilkan sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan Status Pegawai BPSPL Denpasar TA 2025



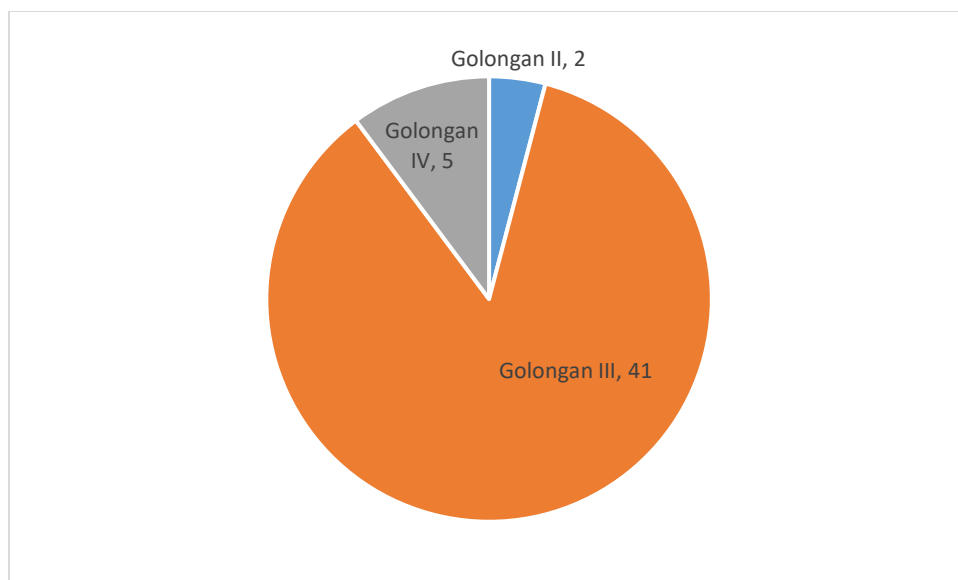
Adapun perincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 3 orang yang kesemuanya berada di Wilker Bali. Sedangkan perincian tenaga kontrak kesemuanya berjumlah 6 orang yang tersebar di Wilker Jawa Timur 1 orang, Wilker NTB 2 orang, Wilker NTT 1 orang dan Wilker Bali 2 orang. Secara rinci ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Perincian PPNPN BPSPL Denpasar TA 2025



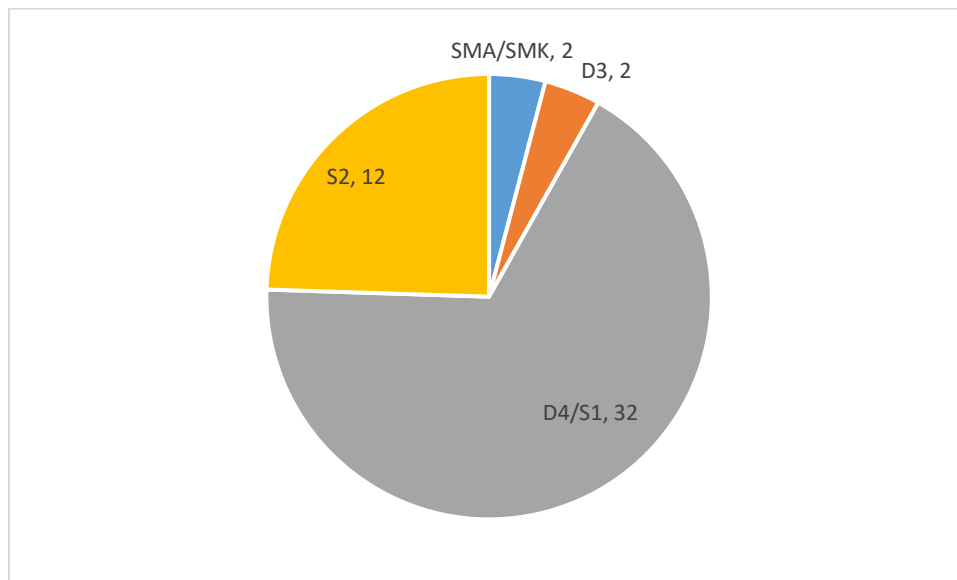
Sedangkan komposisi PNS berdasarkan golongan dan ruang ditampilkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan PNS BPSPL Denpasar TA 2025



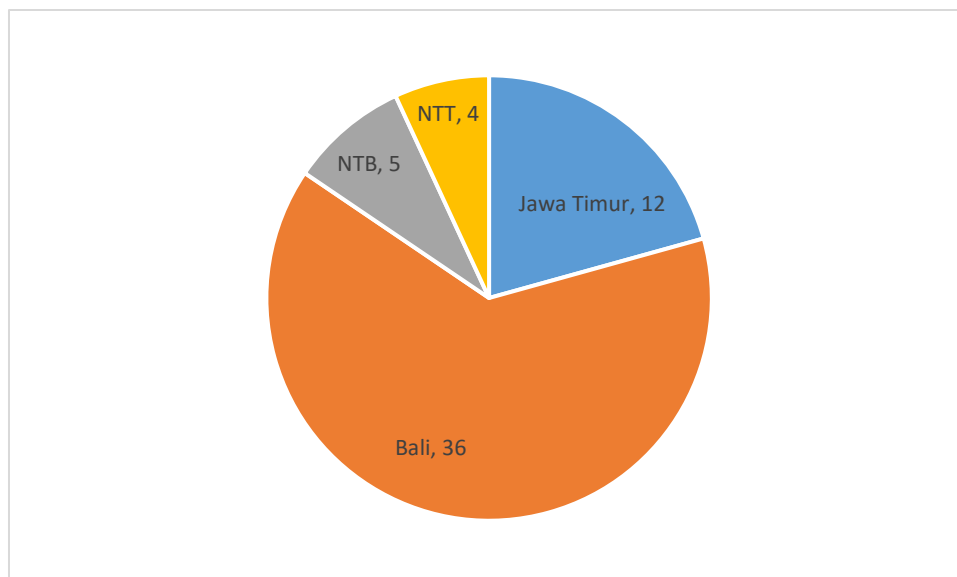
Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Denpasar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Denpasar. Untuk komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik 4 sebagai berikut.

Grafik 4. Tingkat Pendidikan PNS BPSPL Denpasar TA 2025



Selain tingkat pendidikan, penempatan SDM merupakan faktor yang penting dalam mencapai sasaran strategis BPSPL Denpasar yang telah ditetapkan, mengingat BPSPL Denpasar memiliki 3 kantor satker di Surabaya, Mataram dan Kupang. Berikut distribusi PNS, PPPK, dan tenaga kontrak BPSPL Denpasar.

Grafik 5. Distribusi SDM BPSPL Denpasar TA 2025



1.6 Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara

Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove

kritis dan non kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862.627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

BPSPL Denpasar juga melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat selam. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di wilayah kerja.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Benoa	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020
17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyu	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang

cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- c. Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- d. Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

1.7 Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi

8. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
9. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
10. Terdapat beban kerja yang sangat tinggi dan permasalahan yang kompleks terkait pengelolaan ruang laut di Jawa Timur. Perlunya penataan organisasi dengan pembentukan UPT di Jawa Timur.

1.8 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan menginformasikan **Capaian Kinerja Pada Tahun Anggaran 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif,

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2025.

2. Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Laporan
Kinerja
BPSPL
Denpasar
Triwulan I
Tahun
2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di”*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level monitoring dan pengukuran kinerja. Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL), BPSPL Denpasar menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Denpasar berpedoman pada sasaran kegiatan yang diturunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Perjanjian Kinerja awal disahkan pada tanggal 24 Januari 2025.

Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNPB Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaannya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-. Total realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Per 31 Maret 2025)

sesuai data omspan sebesar Rp2.592.915.587,- (12,57%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp1.766.447.046,- (20,74%) dan realisasai belanja barang Rp826,468.541,- (6,90%).

Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



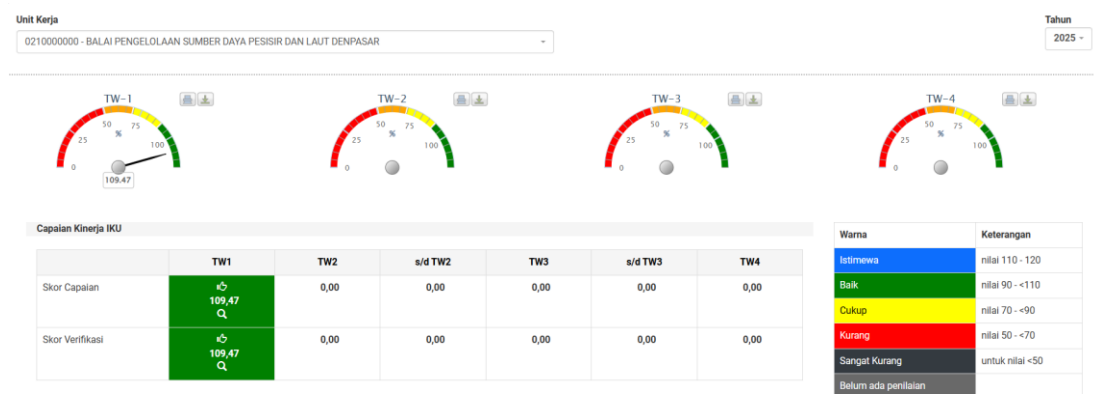
Laporan
Kinerja
BPSPL
Denpasar
Triwulan I
Tahun
2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Denpasar BPSPL Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BPSPL Denpasar terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2025 Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM diperoleh nilai 109,47 (baik).



Gambar 2. NPSS BPSPL Denpasar

Tabel 7. Target dan Realisasi BPSPL Denpasar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	Tahun	1,00	0,00	0,00	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja	Bulan	30,00	0,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
	BPSPL Denpasar (Orang)					
3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	Tahun	5,00	0,00	0,00	-
4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	2,00	0,00	0,00	-
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	Tahun	1,00	0,00	0,00	-
6	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	88,00	0,00	0,00	-
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Semester	92,00	0,00	0,00	-
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	71,50	0,00	0,00	-
9	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	Triwulan	4,00	1,00	1,00	100
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	Semester	87,00	0,00	0,00	-

No	Indikator Kinerja Utama	Frekuensi Perhitungan	Target 2025	TW I		%Kinerjaku
				Target	Capaian	
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	95,00	95,00	100,00	105,26
12	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Tahun	100,00	0,00	0,00	-
13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	Bulan	75,00	0,00	0,00	-
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	Tahun	80,00	0,00	0,00	-
15	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	Triwulan	76,00	76,00	100,00	120
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	Triwulan	91,00	0,00	0,00	-

IK 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Formulasi perhitungan yaitu dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

Tabel 8. Capaian IK 1 BPSPL Denpasar

SK 1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 1	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress kegiatan antara lain rapat awal dan pembagian tugas internal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai fasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi) antara lain:

1. Masterplan Infrastruktur Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
2. Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
3. Monitoring Aktivitas Pemanfaatan Dan Kesesuaian Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
4. Monitoring Biofisik, dan Penjangkauan-Keterlibatan Aspek Sosio-Ekonomi Budaya Masyarakat di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
5. Survei Jenis Prioritas Konservasi di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
6. Rehabilitasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
7. Respon Cepat Penanganan Mamalia Terdampar di Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
8. Penjangkauan Stakeholder Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
9. Kajian Perhitungan Daya Dukung Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor
10. Fasilitasi Persiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi di Perairan di Kepulauan Alor

IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar Kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 9. *Capaian IK 2 BPSPL Denpasar*

SK 2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar					
IK 2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	30	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain rapat awal dan pembagian tugas internal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar adalah Penguatan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan di kepulauan Alor.

IK 3. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan secara berkelanjutan atau jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like species* seperti Hiu, Pari, *Soft Coral*, Banggai Cardinal Fish dan Teripang.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, serta *look a like species* yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 10. Capaian IK 3 BPSPL Denpasar

SK 3	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	5	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain rapat kerja internal tim pelayanan, penyusunan Surat Keputusan tim pelayanan BPSPL Denpasar, pemeriksaan rutin permohonan penerbitan perizinan jenis ikan dan penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

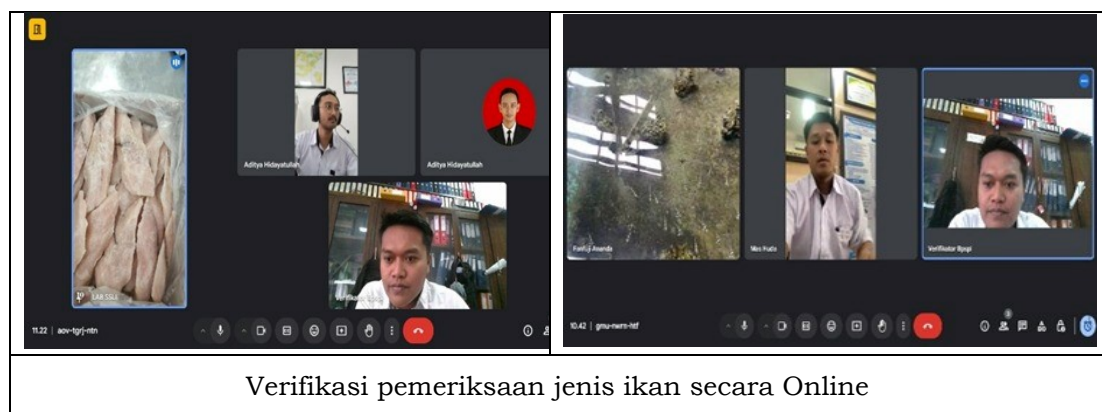
Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis) adalah kegiatan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES sebagai berikut:

1. Rapat kerja internal tim pelayanan
2. Penyusunan SK Tim Pelayanan
3. Pemeriksaan terhadap permohonan penerbitan perijinan jenis ikan rutin dilaksanakan
4. Penerbitan dokumen lalu lintas jenis ikan rutin dilaksanakan

Tabel 11. Dokumentasi IK 3



IK 4. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi pemanfaatan ruang

laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 12. Capaian IK 4 BPSPL Denpasar

SK 4	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	2	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres dari kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

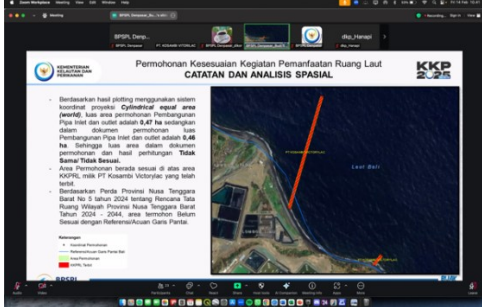
Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

- Menghadiri undangan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRRL sejumlah 47 permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat PRL

- b. Melakukan verifikasi/penilaian teknis permohonan KKPRL sejumlah 13 permohonan yang dilaksanakan oleh BPSPL Denpasar
2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut
 - a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan terkait laporan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan BTID yang dirasa menutup akses melintas masyarakat nelayan setempat serta melakukan koordinasi terhadap BTID dan masyarakat nelayan sehingga didapatkan solusi konkret
 - b. Identifikasi Hak Atas Tanah di Atas Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan melakukan pendataan secara manual menggunakan data BHUMI
 - c. Rapat bersama dengan Pemda Banyuwangi untuk melakukan sinkronisasi aturan pemanfaatan ruang laut terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Dialog Hotel
 - d. Melakukan pelayanan konsultasi kkpri dengan jadwal teratur di Wilayah Kerja Kantor BPSPL Denpasar
 - e. Melaksanakan rapat pembahasan pencabutan HAT di atas laut
 - f. Melaksanakan rapat pembahasan evaluasi RPZ KKPD Nusa Penida serta menimbang masukan pelaku usaha terhadap kesesuaian RPZ dengan kegiatan eksisting
 - g. Melaksanakan rapat evaluasi dan pendataan terhadap para pemilik KKPRL yang telah habis masa berlaku

Tabel 13. Dokumentasi IK 4

	
Verifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	Coaching clinic



IK 5. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut: Jumlah pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar; dan Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Tabel 14. Capaian IK 5 BPSPL Denpasar

SK 5	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar					
IK 5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	1	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres kegiatan antara lain rapat awal dan pembagian tugas internal.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar.

IK 6. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Denpasar. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Ditjen PKRL. Data capaian rillis melalui surat dari Sekretariat Ditjen PKRL.

Kategori dan Predikat nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 15. Capaian IK 6 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 6	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	88	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025.

Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat

progres pada kegiatan layanan perencanaan program dan anggaran serta layanan monitoring evaluasi dan pelaporan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai PM SAKIP BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada IK Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
 - a. Revisi POK 1 pada Bulan Januari untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
 - b. Revisi Pemutakhiran KPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
 - c. Pembaruan data realisasi dan SPJ ready sebagai bahan usulan efisiensi DJPKRL tanggal 14 Februari 2025
 - d. Rapat Tindak Lanjut Efisiensi Anggaran lingkup DJPKRL tanggal 19 Februari 2025
 - e. Pembahasan internal efisiensi anggaran lingkup BPSPL Denpasar Bersama subag umum dan kepala balai tanggal 22 Februari 2025
 - f. Penyiapan bahan dan melakukan revisi DIPA Efisiensi Anggaran tanggal 22 Februari 2025
 - g. Revisi DIPA Efisiensi Anggaran dan RPD tanggal 24 Februari 2025
 - h. Penyampaian draft usulan perubahan kode blokir 4 ke kode A ke Eselon I DJPKRL pada tanggal 17 Maret 2025
 - i. Penyampaian usulan kegiatan dalam rangka pembukaan blokir Kode A pada tanggal 25 Maret 2025

- Layanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Rapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2024 tanggal 8 Januari 2025 secara offline dan online
 - b. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPKRL dan Sesditjen PKRL tanggal 6 Januari 2025 secara online
 - c. Verifikasi Pelaporan Online (kinerja) Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL tanggal 13-16 Januari 2025 di Kota Bandung
 - d. Pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 tanggal 14 dan 23 Januari 2025 secara online
 - e. Pembahasan dan penetapan dokumen perjanjian kinerja satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 tanggal 15 dan 24 Januari 2025 secara online
 - f. Penyusunan laporan kinerja DJPKRL tanggal 20-22 Januari 2025 secara online
 - g. Menghadiri undangan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 di lingkup DJPKRL tanggal 5-7 Februari 2025 secara online
 - h. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 hasil reviu tanggal 10-13 Februari 2025
 - i. Melaksanakan dialog kinerja lingkup BPSPL Denpasar tanggal 25 Februari 2025 secara online
 - j. Mengupload dokumen LKj Tahun 2024 di website esr.menpan.go.id sebagai bukti kelengkapan dokumen SAKIP KKP tanggal 28 Februari 2024
 - k. Pembahasan Manual IKU level 1 dan level II secara daring tanggal 18-19 Maret 2025

IK 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Formula Perhitungan:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 16. Capaian IK 7 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	92	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan manajemen keuangan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Rekonsiliasi LPJ Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi Penerimaan Negara Satker dengan KPPN Denpasar
- Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN Denpasar

IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
2. Baik, apabila NKPA $> 80 - 90$;
3. Cukup, apabila NKPA $> 60 - 80$;
4. Kurang, apabila NKPA $> 50 - 60$;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50 .

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1. Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam

RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times \text{W}_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times \text{WPenggunaan}_{\text{SBK}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times \text{WE}_{\text{Alokasi}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK: Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 17. Capaian IK 8 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	71,5	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan BMN, layanan rumah tangga, dan layanan operational perkantoran.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target nilai kinerja perencanaan anggaran BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

- Layanan BMN
 - a. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan sumber dana PHLN pada kegiatan LAUTRA tahun 2024 pada tanggal 10 Januari 2025
 - b. Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMN Tingkat Eselon I untu periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 13-17 Januari 2025 di Bandung
 - c. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara periode Semester II dan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 16 Januari 2025
 - d. Melakukan Inventarisasi Kondisi Eksisting BMN
 - e. Menyiapkan Dokumen Usulan Penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat
 - f. Melakukan proses usulan Penghapusan BMN pada aplikasi Siman Versi 2 pada modul pengelolaan secara berjenjang melalui tingkat Eselon, Telah dilakukan pemutakhiran data validasi BMN berupa tanah pemerintah serta telah dilakukan proses usulan pendaftaran asuransi BMN berupa sarana dan prasarana gedung bangunan kantor
- Layanan rumah tangga; Penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan untuk menunjang TUSI BPSPL Denpasar
- Layanan perkantoran
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai ketentuan
 - b. Operasional dan pemeliharaan kantor secara rutin

IK 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025:

Penilaian indikator capaian kinerja dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 18. Capaian IK 9 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 9	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
1	1	1	100	0	4	25

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tercapai 1 laporan SPIP Tahun 2024 yang merupakan capaian dari target IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan I tahun 2024. Capaian tersebut adalah Laporan SPIP Tahun 2023 disusun pada Triwulan I Tahun 2024 dan Laporan SPIP Tahun 2024 yang disusun pada Triwulan I Tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen) adalah telah dilakukan penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP TW IV Tahun 2024.

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

Tabel 19. Capaian IK 10 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	87	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progres pada kegiatan layanan manajemen SDM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikator Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

c. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target indeks profesionalitas (IP ASN) lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks) adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Periode Bulan Februari dan Maret TA. 2025
2. Evaluasi Kinerja ASN BPSPL Denpasar Triw. 4 dan Periode Final TA. 2024
3. Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK a.n Dikor Jupantara
4. Pengusulan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional a.n Yuniarti KP
5. Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode April 2025
6. Menyiapkan Rekapitulasi kehadiran ASN BPSPL Denpasar Bulan Januari-Maret 2024
7. Pengusulan Satyalancana Karya Satya X Tahun dan XX Tahun
8. Menyiapkan dan melaksanakan Dialog Kinerja BPSPL Denpasar
9. Pengusulan Perpindahan antar Jabatan a.n Anang Tri Jayanto dan Nurhamdani
10. Pengusulan Rencana Tugas Belajar Tahun 2025
11. Menyiapkan Rekapitulasi Pengisian SPT Tahunan dan LHKPN lingkup BPSPL Denpasar
12. Pengusulan Penataan Jabatan Fungsional Umum Lingkup BPSPL Denpasar

IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Denpasar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 20. Capaian IK 11 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
100	95	100	105	-	95	105

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL Denpasar tercapai 100% dari target 95%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan I tahun 2024. Capaian tersebut adalah rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2023 yang ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2024 dengan target 80% tercapai 100% dan rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2024 ditindaklanjuti pada Triwulan I Tahun 2025 dengan target 95% tercapai 100% .

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPSPL.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Denpasar) tanggal 19-25 Januari 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP
2. Menyiapkan dokumen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi
3. Melakukan upload dokumen tindaklanjut pada Aplikasi SIDAK KKP
4. Seluruh Temuan APIP atas audit Pertanggungjawaban LAUTRA telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Tindak Lanjut

IK 12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar(%)

Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPSPL Denpasar Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Denpasar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Denpasar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 21. Capaian IK 12 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini juga tidak ada temuan BPK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung karena tidak ada temuan BPK.

IK 13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Formulasi perhitungan yaitu dengan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 22. Capaian IK 13 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	75	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress kegiatan Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

e. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan TIM WBK dan pembagian Pokja kegiatan
2. Evaluasi pengisian data dukung WBK
3. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada bulan Maret 2025

IK 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- Pengawasan sistem kearsipan internal
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.
- Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
- Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Denpasar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI yang mencakup aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - penciptaan arsip (25%)
 - penggunaan arsip (25%)
 - pemeliharaan arsip (25%)
 - penyusutan arsip (25%)
2. Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%)
 - sumber daya manusia kearsipan (50%)
 - prasarana dan sarana (50%)
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 – 70
CC	Cukup	> 50 – 60
C	Kurang	> 30 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 23. Capaian IK 14 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan layanan persuratan, tata usaha, dan kearsipan secara rutin.

IK 15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Presentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan Pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 24. Capaian IK 15 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 15	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	76	100	120 (kinerjaku)	-	76	120

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Capaian presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar tercapai 100% dari target 76%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 karena Indikator Kinerja ini ada pada tahun 2025 dan tidak ada pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan target setiap triwulan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pada presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan revisi Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan Revisi POK 1 yang telah disahkan
- Telah dilaksanakan penyiapan bahan untuk revisi rencana umum pengadaan sesuai revisi DIPA 2 dalam rangka efisiensi anggaran
- Revisi Rencana Umum Pengadaan pasca efisiensi anggaran
- Pengisian kertas kerja data RUP pasca efisiensi anggaran

IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: Mengumumkan informasi publik; Menyediakan

informasi publik; Sarana dan Prasarana; Kelembagaan; dan Digitalisasi.

Formula Perhitungan:

1. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
2. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
3. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
4. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.
5. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No.	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 25. Capaian IK 16 BPSPL Denpasar

SK 6	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar					
IK 15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian TW I	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024 (%)	Target PK 2025	% Realisasi Thd PK
-	-	-	-	-	91	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak terdapat target dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Target dan capaian pada akhir tahun 2025. Pada IK ini hanya terdapat progress layanan kehumasan yaitu publikasi secara rutin.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Capaian belum dapat dibandingkan karena frekuensi pengukuran Indikato Kinerja adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

b. Analisis Keberhasilan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahun untuk mendukung tercapainya target pada akhir tahun berjalan dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan tim dalam mencapai target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai) adalah melaksanakan publikasi kegiatan secara rutin.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 ini Pagu awal BPSPL Denpasar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.627.700.000,- yang terdiri dari rupiah murni Rp12.012.700.000,-, PNBPNP Rp2.075.000.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp6.540.000.000,-. Dari pagu awal terdapat dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) berupa blokir kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dan blokir kode 2 (alokasi harus dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait) sebesar

Rp2.905.441.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp2.880.941.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp 24.500.000,-.

Pada Bulan Februari Tahun 2025, terdapat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi pada anggaran dibawah pengelolaanya. Setelah dilakukan revisi DIPA efisiensi anggaran pada tanggal 23 Februari 2025, pagu anggaran BPSPL Denpasar sebesar Rp20.627.700.000,- dengan jumlah dana yang diblokir sebesar Rp4.523.858.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) Rp 4.499.358.000,- dan belanja modal (53) Rp24.500.000,-. Total realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Per 31 Maret 2025) sesuai data omspan sebesar Rp2.592.915.587,- (12,57%) dengan rincian realisasi belanja pegawai Rp1.766.447.046,- (20,74%) dan realisasai belanja barang Rp826,468.541,- (6,90%). Adapun realisasi anggaran BPSPL Denpasar secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran BPSPL Denpasar Tahun 2025

Uraian			Pagu	Realisasi	
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		4,904,731,000	0	0.00 %
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		4,904,731,000	0	0.00 %
	QMA	Data dan Informasi Publik	0	0	0.00 %
	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	0	0	0.00 %
	REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	4,904,731,000	0	0.00 %
	REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA	4,904,731,000	0	0.00 %
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		0	0	0.00 %
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		0	0	0.00 %
	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	0	0	0.00 %
	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	0	0	0.00 %
HB.2366	Penataan Ruang Laut		0	0	0.00 %
	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	0	0	0.00 %
	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	0	0	0.00 %
WA	Program Dukungan Manajemen		11,252,771,000	2,593,580,294	23.05 %
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		11,252,771,000	2,593,580,294	23.05 %
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,961,818,000	2,562,524,145	23.38 %
	EBA.956	Layanan BMN	48,770,000	7,142,434	14.65 %
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	15,294,000	10,376,668	67.85 %

Uraian				Pagu	Realisasi	
		EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6,335,000	0	0.00 %
		EBA.962	Layanan Umum	81,009,000	2,434,000	3.00 %
		EBA.994	Layanan Perkantoran	10,810,410,000	2,542,571,043	23.52 %
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	65,355,000	5,536,435	8.47 %
		EBC.954	Layanan Manajemen SDM	65,355,000	5,536,435	8.47 %
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	225,598,000	25,519,714	11.31 %
		EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	70,594,000	0	0.00 %
		EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49,991,000	5,123,269	10.25 %
		EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	105,013,000	20,396,445	19.42 %

BAB IV

Penutup



Laporan
Kinerja
BPSPL
Denpasar
Triwulan I
Tahun
2025

1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Telah diupayakan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada periode Triwulan IV Tahun 2024 terhadap perbaikan kinerja ke depan antara lain sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Mengupayakan capaian target jenis ikan yang dilindungi dan/atau dimanfaatkan untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan	Telah memaksimalkan capaian target jenis ikan yang dilindungi dan/atau dimanfaatkan. Pada Triwulan I terdapat 5 jenis ikan dan akan bertambah pada Triwulan berikutnya hingga target akhir tahun
Pada indikator penggunaan SBK BPSPL Denpasar untuk memperhatikan indeks realisasi anggaran tidak melebihi SBK dan pada indikator efisiensi SBK BPSPL Denpasar agar memperhatikan Indeks Realisasi Anggaran tidak lebih dari 20% di bawah indeks SBK	Akan ditindaklanjuti pada akhir tahun 2025

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Denpasar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridinprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Getreda Melsina Hehanussa**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar


Getreda Melsina Hehanussa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
DENPASAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1.	Daerah yang difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Orang)	30
3.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Denpasar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	87
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Denpasar (%)	95
		12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Denpasar (Nilai)	80
		15. Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Denpasar (%)	76
		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	91

2. Penghargaan yang Diterima BPSPL Denpasar

- Penghargaan Satker dengan Presentase Tertinggi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Tahun 2024 yang Diserahkan pada Bulan Januari 2025



- Piagam Penghargaan Atas Capaian Kinerja Organisasi Predikat Baik Triwulan IV Tahun 2024



- Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif





BPSPL
DENPASAR
#BijakMengelolaLaut



Salam
PRIMA

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**